

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah adalah melaksanakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah membutuhkan biaya pembangunan yang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan biaya pembangunan secara nasional. Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia dan tersedianya dana yang memadai, baik dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun Daerah Provinsi yang dilihat dari pendapatan daerah.

Salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengetahui tentang kemampuan daerah dalam mengurus rumah sendiri adalah peningkatan pemerintah daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejalan dengan tujuan yang di capai Pemerintah Daerah sebagai salah satu rumah tangga yang diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri tentu membutuhkan pembiayaan yang cukup. Oleh karena itu pemerintah pusat memberikan wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber penerimaan yang berkesinambungan yang dapat diharapkan masuk ke kas daerah untuk melaksanakan aktifitas pemerintahan.

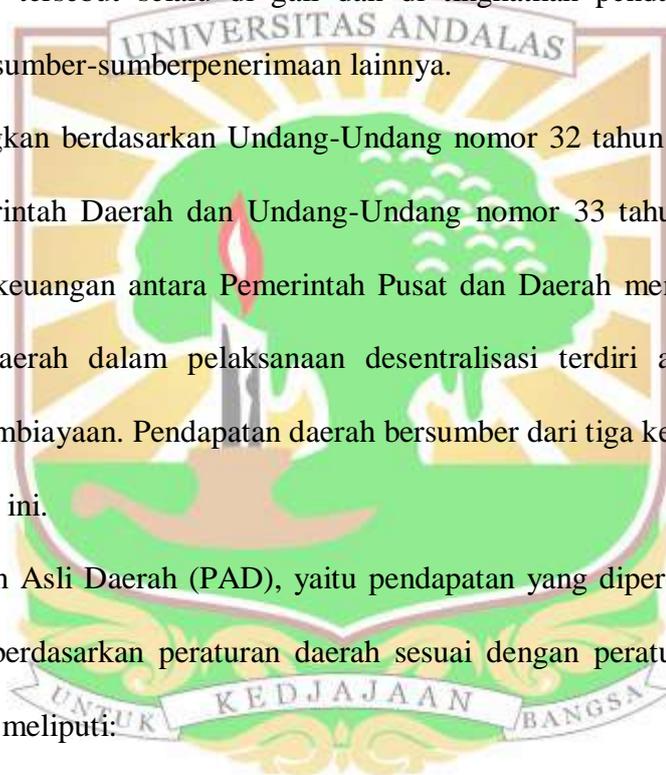
Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak

berlakunya otonomi daerah dipacu unuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah, undang-undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Oleh karena itu, kedua sumber tersebut selalu di gali dan di tingkatkan pendapatannya tanpa mengabaikan sumber-sumber penerimaan lainnya.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok sebagai mana dibawah ini.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. Pajak Daerah.
 - b. Retribusi Daerah, termasuk dari hasil pelayanan badan layanan umum (BLU) daerah.
 - c. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



2. Dana Perimbangan
 - a. Dana bagi hasil
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut peraturan daerah kota Padang no.8 tahun 2002 menjelaskan bahwa retribusi pasar adalah pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar dan atau pemberian izin tertentu oleh Kepala Daerah terhadap pengelolaan pasar.

Diantara bagian pendapatan daerah diatas, bila ditinjau dari sudut kebijakan dalam penggunaan dana, Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian pendapatan yang paling memberikan otonomi kepada daerah dibanding dengan sumber-sumber pendapatan lainnya.

Kondisi-kondisi seperti ini tentunya membutuhkan perhatian yang khusus dari Pemerintah Daerah, belum lagi ditambah pelayanan yang belum optimal dari para pemungut retribusi. Karena pentingnya pemungutan retribusi maka perlu pengelolaan yang baik, maka penulis menuangkannya kedalam bentuk laporan kerja praktek/laporan magang dengan judul **“MEKANISME PENGELOLAAN DAN MANFAAT RETRIBUSI PASAR PADA DINAS PASAR KOTA PADANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan retribusi pasar pada dinas pasar kota Padang.
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pasar dalam meningkatkan pelayanan di Pasar Raya.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengelolaan retribusi pasar pada dinas pasar kota Padang.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh kepala dinas pasar kota Padang dalam meningkatkan layanan di pasar raya.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Dinas Pasar, dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi besarnya sumber Retribusi Pasar Kota Padang.
2. Bagi penulis, dapat menambah wawasan tentang retribusi pasar dan mengetahui target yang ditetapkan, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemkot Padang untuk mengambil kebijaksanaan dalam usahanya untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar.
3. Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai acuan atau bahan referensi bagi peneliti selanjutnya,serta menambah pengetahuan dalam meningkatkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh sebelumnya.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada Dinas Pasar Kota Padang yang bertempat di Jln. Hasannudin No.2 Padang, Sumatera Barat. Kegiatan magang ini berlangsung selama 2bulan, atau lebih kurang 40 hari kerja. Dimulai pada tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan 13 Maret 2015.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan atau pembuatan laporan magang ini masalah yang akan dibahas sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup dari judul yang penulis ajukan. Pada sistematika penulisan yang dapat dilihat sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan
- BAB II : LANDASAN TEORI menggambarkan tentang tinjauan pustaka, uraian kualitatif atau segala sesuatu yang menjadi landasan teori dalam penyelesaian laporan magang.
- BAB III : GAMBARAN UMUM merupakan gambaran umum Dinas Pasar Kota Padang.
- BAB IV : PEMBAHASAN merupakan bagian yang menggambarkan tentang hasil yang diperoleh dari pengalaman selama magang berupa penjelasan teori.
- BAB V : PENUTUP merupakan bab yang memuat kesimpulan dari uraian yang telah di kemukakan sebelumnya serta saran yang hendak disampaikan yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak.